

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik akan selalu terjadi dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia, karena *survival* ditentukan oleh kemampuan dalam mengelola konflik yang mana di dalamnya terdapat berbagai kontradiksi dalam kepentingan dan nilai-nilai antara individu maupun kelompok. Sumber dari konflik atau hubungan saling bertentangan ini tidak hanya berasal dari faktor kepentingan ekonomi ataupun kepentingan atas kekuasaan, melainkan juga karena perbedaan nilai-nilai dan identitas.

Dalam ranah Hubungan Internasional, aktor yang terlibat dalam sebuah konflik dapat melibatkan negara dengan negara, ataupun negara dengan kelompok dalam negara itu sendiri. Atau disebut dengan perang internal atau perang saudara yang mana menelan korban dari masyarakat sipil. Perang saudara ini semakin meningkat dengan berakhirnya perang dingin serta kebangkitan nasionalisme dan identitas etnis setelah runtuhnya dua kubu kekuasaan dalam tatanan dunia. Selain itu, runtuhnya sistem sosialis Soviet juga berdampak kepada kapitalisme global yang bebas sehingga mempengaruhi terhadap upaya pembangunan ekonomi dan tatanan masyarakat yang lebih demokratis.¹

Kolumbia merupakan salah satu negara di dataran Amerika Latin yang telah mengalami sejarah pemberontakan dan proses menuju perdamaian yang sangat

¹ Simon Fisher et al, *Mengelola Konflik, Keterampilan dan strategi untuk bertindak*, terj. S.N Kartikasari (Jakarta, 2001), hal.6-7

panjang. Pemberontakan ini didasari oleh sejarah konflik sipil yang bernama La Violencia, terjadi pada tahun 1947-1948 melibatkan dua partai dominan yaitu Liberal dan Konservatif yang saling memperebutkan kekuasaan.

Konflik yang telah berlangsung lebih dari setengah abad ini semakin memuncak dengan munculnya kelompok-kelompok pemberontak bersenjata pada pertengahan tahun 1960-an. Kelompok-kelompok ini sebagian besar berasal dari kalangan petani (*peasant*) berideologi komunis-sosialis termarginalkan dari sumber-sumber kekuasaan. Mereka ingin menggulingkan pemerintah untuk memperjuangkan hak sosial, politik dan ekonomi yang mana pada saat itu tersentralisasi hanya kepada dua partai besar yaitu Partai Liberal (*Liberal Party*) dan Konservatif (*Conservative Party*).

Kelompok bersenjata yang telah terlibat sepanjang setengah abad sejarah konflik Kolumbia diantaranya adalah FARC (*Revolutionary Armed Forces of Columbia*) merupakan kelompok bersenjata berideologi komunis terbesar di Kolumbia, ELN (*The National Liberation Army*), The Popular Army of Liberation (EPL), dan The 19th of April Movement (M-19). Kelompok gerilya ini muncul sebagai reaksi dalam menanggapi pelarangan gerakan politik di luar National Front, termarginalkannya kaum miskin dan pinggiran, keberadaan pengaruh komunis dan ideologi sosialis, serta tidak efektifnya sistem peradilan

dan hukum.² Upaya perdamaian dan demobilisasi kelompok-kelompok bersenjata tersebut terus dilakukan hingga akhirnya menyisakan FARC dan ELN.

Pada awal tahun 90' an Presiden Virgilio Barco (1986-1990) dan Presiden Cesar Gaviria (1990-1994) berhasil mencapai kesepakatan damai dengan demobilisasi kelompok pemberontak M-19 – transformasi menjadi sebuah partai politik yaitu M-19 Democratic Alliance (AD/M-19) – dan EPL sekaligus memberikan kesempatan bagi kedua kelompok untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi di Kolumbia. Pada tahun 2006 tepatnya pada masa kepemimpinan Presiden Alvaro Uribe, kelompok bersenjata ilegal yang bernaung di bawah *umbrella group* The United Self-Defense Groups of Colombia (AUC) berhasil didemobilisasi seiring dengan implementasi ‘Peace and Justice Law’ yang berhasil mendemobilisasi sebanyak 31.849 paramiliter dan sejumlah 4.237 paramiliter yang terbukti terjerat dalam kasus pelanggaran HAM.³

FARC sendiri merupakan kelompok gerilya terbesar di Kolumbia yang anggotanya sebagian besar merupakan petani pinggiran (*rural*). FARC juga telah memulai perjuangannya dalam melawan pemerintah sejak kemunculannya tahun 1960-an bersama dengan kelompok gerilya lain. Namun, seiring dengan berkembangnya upaya perdamaian oleh pemerintah Kolumbia sepanjang 50 tahun terakhir, satu persatu kelompok gerilya tersebut berhasil didemobilisasi. Kekuatan dan dominasi FARC semakin berkembang dibuktikan dengan pengontrolan

² “Colombia: Country Profile – September 2008 Main Report,” *Economist Intelligence Unit*, September 2008, diakses April 29, 2010, (<http://portal.eiu.com>) dikutip oleh G. Lopez, “The Colombian Civil War : Potential for Justice in a Culture of Violence” *Policy Briefing*, vol. 2 no. 1, 2011, hal. 7

³ Adam Isacson, *Ending 50 Years of Conflict*, WOLA Publication, April 2014, hal. 8

sebagian besar wilayah *rural* Kolumbia yang hampir berada di luar pengawasan aparat Kolumbia. FARC bertahan dan membangun kekuatan militernya untuk melawan pemerintah Kolumbia dengan melakukan aksi-aksi pemerasan, pencurian, dan penculikan dengan meminta uang tebusan. Selain itu, FARC juga mempersenjatai kelompok mereka dengan melakukan rekrutmen kombatan anak-anak sebagai tentara bersenjata. Luasnya teritori Kolumbia dan banyaknya area yang tidak berada di bawah pengawasan pemerintah dan aparat Kolumbia membuat FARC semakin menancapkan basis-basis kekuasaannya dan pengaruhnya di sebagian besar daerah *rural*. 158 dari 1099 Kota di Kolumbia dianggap lemah oleh FARC. Karena, merupakan teritori yang lepas dari pengawasan aparat pemerintah. Hingga tahun 1990, diperkirakan 40 persen dari keseluruhan teritori Kolumbia berada di bawah kontrol FARC.⁴

Semenjak kemunculan kartel-kartel obat bius di Kolumbia yang disebabkan oleh bergesernya wilayah produksi kokain yang awalnya berada di Bolivia dan Peru, FARC mulai memperluas area kekuasaannya ke daerah sumber-sumber penghasil obat bius. Selain itu, secara massiv meraup keuntungan untuk mendanai kelangsungan organisasi gerilya dan persenjataan melalui keterlibatan lebih jauh dalam proses perdagangan kokain dan obat bius yang berada di dalam daerah kontrolnya. Walaupun tidak secara langsung terlibat dalam transaksi perdagangan obat bius, FARC mendapatkan profit hampir di seluruh proses pengolahan obat bius. Seperti mengontrol secara langsung area-area perkebunan koka dan penanaman, pengambilan pajak komoditas, proses pembuatan, dan

⁴ June S Beittel, "Peace Talks in Colombia", *Congressional Research Service Report*, hal. 4, diakses di < <http://fas.org/sgp/crs/row/R42982.pdf> > pada 14 September 2014.

distribusi. Dari sini, pada tahun 2000, 60 persen dari seluruh pemrosesan kokain di Kolombia dikuasai oleh FARC dan meraup keuntungan sekitar 300 sampai 700 juta Dollar Amerika setiap tahunnya, dan 65% berasal dari *drug trade taxation*⁵

Karena itu, FARC dikatakan sebagai organisasi gerakan gerilya paling sukses di Amerika Latin dilihat dari survivalitas, pencapaian dan pengaruh yang diberikan. Berdasarkan pendapatan yang dihasilkan melalui aktivitas kriminalnya FARC juga dianggap sebagai salah satu organisasi gerakan gerilya dengan kekayaan paling tinggi di dunia yang sebagian besar keuntungan didapat dari aktifitas *drug trafficking* dan sebagian lainnya berasal dari aksi perampokan, penculikan, dan pemerasan. Hal ini mendukung peningkatan jumlah rekrutmen kombatan yang dihasilkan setiap tahunnya, tercatat dari tahun 1986-1996 jumlah kombatan berjumlah 3600 meningkat menjadi 16500 kombatan⁶. Pada tahun 2000 jumlah kombatan FARC diestimasikan sebanyak 17000-18000⁷ kombatan yang terbagi ke dalam 61 front di 5 blok.

Redistribusi lahan tetap menjadi isu perdebatan dengan FARC, mereka mempertahankan bahwa pemerintah harus menyerahkan sekitar 50 juta hektar tanah untuk rakyat miskin. Di samping itu, mereka juga menuntut kepada pemerintah Kolombia untuk memberi batasan pada seberapa banyak properti yang mungkin dimiliki oleh pemilik tanah tunggal. Hingga hari ini 52% dari peternakan

⁵ Katharina Röhl, "Greed or Grievance: Why does the FARC keeps fighting?" hal. 3, diakses di (<http://www.monitor.upeace.org/Colombia.pdf>) pada 10 Oktober 2014

⁶ Bouvier dan Virginia Marie, *Colombia: Building Peace in a Time of War* (Washington, D.C.: United States Institute of Peace, 2009), dalam G. Lopez, "The Colombian Civil War: Potential for Justice in a Culture of Violence" *Policy Briefing*, vol. 2 no. 1, 2011.

⁷ *FARC Multimedia Presentation*, International Crisis Group oleh Crisis Group Communication Unit in Brussels and Latin America <http://www.crisisgroup.be/flash/farc_mar09/farc.html> diakses pada : 19 September 2014

Kolombia dimiliki oleh 1% dari pemilik tanah. Ketimpangan ekonomi secara umum inilah yang mendorong FARC melawan negara Kolombia semenjak 50 tahun yang lalu.⁸ Pemberontakan dan konflik yang dihadapi oleh pemerintah Kolombia dengan kelompok gerilyawan ini diakibatkan oleh kelemahan pemerintah dan kurangnya legitimasi otoritas negara dalam mengontrol keberadaan teritori negara dengan area yang cukup luas.

Situasi dan aktor yang terlibat dalam konflik semakin kompleks semenjak tahun 1980-1990. Kartel-kartel perdagangan obat bius yang berbasis di Bogotá, Medellin, dan Cali mulai muncul di Kolombia. Para pemilik lahan coca dan *drug trafficker* melancarkan terror terhadap pemerintah berbentuk pembunuhan hakim dan polisi, pemboman di kantor-kantor media, dan pembunuhan politisi sebagai usaha untuk melegalkan operasi perdagangan obat bius mereka. FARC yang berbasiskan kalangan petani, pada awalnya melawan pemerintah sebagai reaksi dari ketimpangan dan ketidakmampuan pemerintah dalam menangani permasalahan distribusi lahan untuk petani pinggiran. Namun, setelah kemunculan kartel-kartel obat bius tersebut FARC beralih kepada perdagangan narkoba dan obat bius yang mana merupakan sebagian besar sumber finansial bagi kelompok gerilya.

Pada saat yang sama, pemilik lahan obat dan *drug traffickers* berupaya untuk membebaskan diri dari tekanan kelompok gerilya dengan membentuk kelompok paramiliter *The United Self-Defense Groups of Colombia* (AUC) atau

⁸ *Can Colombia and the FARC Make Peace?* (http://www.huffingtonpost.com/daniel-wagner/can-colombia-and-the-farc_b_3321197.html) diakses pada : 19 Juli 2014

kelompok bersenjata illegal. Yaitu sebagai alat dalam melindungi wilayah kekuasaan dan produksi kartel-kartel obat bius dari kelompok gerilya FARC. Berkembangnya perdagangan obat illegal dan kokain sebagai sumber daya penting bagi para *drug trafficker* telah memicu kekerasan di Kolombia. Kekerasan dan konflik antara gerilyawan dengan kelompok paramiliter semakin memuncak dimotori oleh upaya menguasai ladang kokain dan jalur perdagangan narkotika di Kolombia.

Konflik terbuka yang terjadi antara kelompok gerilya, paramiliter dan pemerintah menjatuhkan korban yang tidak sedikit dari warga sipil dan kalangan petani pinggiran. Jika diakumulasikan, kekerasan yang dilakukan FARC dan ELN serta pasukan paramiliter ini setidaknya telah menelan korban sebanyak 220.000 masyarakat Kolombia. Lebih dari 177.300 atau 80 persen yang merupakan rakyat sipil menjadi korban penculikan, pembunuhan, pemerasan, dan pengusiran dari tempat tinggal. Menurut laporan, 40.787 korban lainnya terdiri dari angkatan bersenjata negara dan para pemberontak, serta kelompok paramiliter yang terbunuh dalam pertempuran.⁹

Beberapa upaya perdamaian dengan FARC untuk mengakhiri konflik menggunakan jalan gencatan senjata dan upaya negosiasi oleh pemerintah Kolombia sudah pernah dilakukan sepanjang masa presidensi Betancur hingga Andreas Pastrana. Kegagalan terakhir atas kesepakatan perdamaian antara pemerintah dengan FARC dan ELN terjadi pada saat pemerintahan Presiden

⁹ Al-Jazeera : Report says 220,000 died in Colombia conflict, Al-Jazeera (Online)
<<http://www.aljazeera.com/news/americas/2013/07/201372511122146399.html>> diakses pada : 22 Juli 2014

Andreas Pastrana (1998-2002). Seiring dengan adanya keterlibatan Amerika Serikat sepanjang proses perdamaian, hal ini telah mempengaruhi pandangan FARC terhadap kesungguhan pemerintah Pastrana dalam melakukan perundingan damai. Selain itu, kegagalan ini disebabkan oleh upaya negosiasi dilakukan pada saat kondisi negara Kolumbia pada saat itu yang disinyalir lemah karena tekanan dari kelompok gerilya. Kondisi ini didorong oleh kombinasi dari kelemahan pemerintah pusat, tentara yang tidak mampu menghadapi pemberontak, pasukan polisi tidak dapat secara efektif menjaga ketertiban bahkan di banyak lingkungan perkotaan, dan kemampuan para pemberontak dan paramiliter untuk mengakses persediaan dan senjata dari luar negeri.¹⁰

Penciptaan zona demilitarisasi untuk proses perundingan damai di Kolumbia Selatan dimanfaatkan oleh FARC sebagai suaka dalam memobilisasi kekuatan dengan mengimpor senjata, ekspor obat-obatan dan kembali membangun kekuatan persenjataan. Pembicaraan damai gagal setelah FARC melakukan pembajakan pesawat dan penculikan warga sipil di Cali serta menculik Senator Jorge Gechem dan Kandidat Presiden Ingrid Betancourt pada Februari 2002. Langkah-langkah perdamaian yang dilakukan pada masa ini dianggap sebagai kegagalan besar, dan berakhir dengan penghimpunan kembali kekuatan kelompok gerilya.

Pada masa pemerintahan Presiden Alvaro Uribe, upaya perdamaian dengan FARC melalui jalan negosiasi pun berhenti, ia lebih memfokuskan kepada

¹⁰ Peter DeShazo, *et al*, "Countering Threats to Security and Stability in a Failing State : Lessons from Columbia," *A Report of The CSIS Americas Program*, Center for Strategic and International Studies (CSIS) (Washington, 2009) hal. 7

upaya demobilisasi kelompok paramiliter. Melihat kegagalan negosiasi sebelumnya yang didukung oleh kelemahan pertahanan negara Kolombia, sebaliknya Presiden Alvaro Uribe cenderung menggunakan cara-cara represif militer untuk menghadapi FARC. Hal ini disebabkan pandangannya akan kegagalan Pastrana dalam menegakkan supremasi hukum yaitu dengan tidak mengambil sikap yang lebih agresif menghadapi kelompok gerilya. Uribe percaya bahwa pendekatan dengan militer yang kuat pada akhirnya akan membawa para kelompok gerilya ke meja perundingan.¹¹ Semenjak tahun 2002-2006, didukung oleh bantuan pendanaan militer AS melalui Plan Patriota, Uribe telah melancarkan serangan besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap FARC.¹² Jumlah personil militer Kolombia telah meningkat dari 158.000 ke 207.000. Selain itu, jumlah Kepolisian Nasional Kolombia telah meningkat dari 97.000 sampai 121.000 anggota pada pemerintahan Uribe.¹³

Menurut Bogota-based defense think tank Fundación Seguridad y Democracia, Pasukan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC) melancarkan lebih banyak serangan terhadap militer Kolombia selama dua tahun pertama pemerintahan Uribe dibandingkan dengan dua tahun pertama mantan presiden Andrés Pastrana. Bahkan, frekuensi penyerangan FARC meningkat rata-rata dua kali sehari pada tahun 2004. Selama enam bulan pertama tahun 2005, FARC melancarkan serangan besar-besaran terhadap pangkalan militer dan departemen

¹¹ *Alvaro Uribe Velez (2002-2010)*, Global Security (Online) <<http://www.globalsecurity.org/military/world/colombia/uribe.htm>> diakses pada : 26 Juli 2014

¹² *Profiles: Colombia's armed groups*, BBC (Online) <<http://www.bbc.com/news/world-latin-america-11400950>> diakses pada : 25 Juli 2014

¹³ Garry Leech, "The Successes and Failures of President Uribe," Columbia Journal (Online) <<http://colombiajournal.org/the-successes-and-failures-of-president-uribe.htm>> diakses pada : 24 Juli 2014

Antioquia, Arauca, North Santander, Putumayo dan Nariño. Serangan ini menewaskan lebih dari 200 tentara yang tewas dan menyebabkan pengunduran diri Menteri Pertahanan Jorge Alberto Uribe.¹⁴

Setelah konflik mengalami eskalasi yang terus meningkat, telah dilakukannya beberapa upaya negosiasi oleh pemerintah Kolombia sebelumnya, serta terhentinya inisiatif perdamaian selama 8 tahun di bawah kepemimpinan presiden Alvaro Uribe, pada tahun 2012 di bawah kepemimpinan Presiden Juan Manuel Santos yang menjabat sebagai Presiden Kolombia pada tahun 2010 dan terpilih kembali sebagai Presiden pada Maret 2014, bersama FARC kembali ke meja perundingan untuk menyudahi konflik 50 tahun ini. Perundingan damai ini merupakan upaya ke-4 yang telah dilakukan pemerintah Kolombia semenjak kepemimpinan Presiden Bentancur, dan menjadi perundingan damai pertama antara pemerintah Kolombia dan FARC yang telah mencapai beberapa point kesepakatan dalam sejumlah agenda yang direncanakan.

Pembicaraan damai dibuka di Oslo, Norwegia pada bulan Oktober 2012 dan diteruskan di Havana, Kuba dari bulan November hingga kini. Pembicaraan damai antara pemerintahan Kolombia di bawah pemerintahan Presiden Juan Manuel Santos dan FARC membicarakan 6 poin agenda yang menjadi pembahasan utama dalam perundingan damai. 6 point yang telah diagendakan oleh negosiator dan akan dibicarakan oleh kedua pihak diantaranya adalah: Reformasi Lahan (*Land Reform*), Partisipasi Politik (*Political Participation*), Gencatan Senjata (*Disarmament*), Kebijakan dalam Perdagangan Gelap Obat Bius

¹⁴ Garry Leech, *ibid*

(Illicit Drugs), Keadilan Bagi Korban (*Rights of the Victims*), dan Implementasi Kesepakatan Damai (*Peace Deal Implementation*). Hingga tahun 2014, 3 point agenda yang telah disepakati oleh kedua belah pihak adalah Reformasi Lahan, Partisipasi Politik dan Kebijakan dalam Perdagangan Gelap Obat Bius.

Melihat keberhasilan Presiden Juan Manuel Santos dalam membawa kelompok gerilya FARC kembali ke meja perundingan setelah 50 tahun lamanya konflik mengalami eskalasi, negosiasi yang tak kunjung berhasil, serta sempat terhentinya upaya perdamaian selama 1 dekade, menarik untuk mengidentifikasi faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya perundingan damai antara pemerintah Kolumbia dengan FARC pada tahun 2012-2014 ini.

B. Rumusan Masalah

Setelah melihat sejarah dari konflik yang terjadi antara kelompok gerilya FARC dan pemerintah Kolumbia serta perjalanan upaya perdamaian serta kondisi yang telah dicapai kedua pihak pada tahun 2012 hingga tahun 2014 ini penulis bermaksud untuk mengetahui **“Faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya perundingan damai antara FARC dan pemerintah Kolumbia pada tahun 2012 hingga tercapainya beberapa kesepakatan yang telah dihasilkan tahun 2014 ini?”**

C. Landasan Konseptual

Dalam menandai proses terminasi konflik setelah mengalami fase eskalasi, penulis menggunakan konsep De-eskalasi untuk menjelaskan kondisi

apakah yang dapat melatarbelakangi terjadinya sebuah negosiasi di antara pihak-pihak yang berkonflik.

De-eskalasi merupakan sebuah kondisi atau fase dalam penahapan konflik di mana kelompok yang berkonflik tidak lagi berperang atau melakukan kekerasan, selain itu dalam kondisi ini juga memungkinkan dilakukan sebuah gencatan senjata di antara kedua belah pihak dan juga adanya bantuan mediasi dari pihak ketiga.¹⁵ Kendati, faktor yang paling penting adalah adanya keinginan dari kedua kelompok yang berkonflik sendiri dalam mempertimbangkan sebuah upaya negosiasi.

Dalam sebuah konflik bersenjata, para kelompok bersedia dalam mempertimbangkan sebuah negosiasi ketika mereka telah kehilangan harapan dalam mencapai tujuan mereka dengan menggunakan senjata dan kekerasan.¹⁶ De-eskalasi konflik mengacu pada menurunnya penggunaan taktik berperang yaitu sarana koersif dan berkurangnya jumlah kombatan yang terlibat dalam kelompok yang bertikai.¹⁷ De-eskalasi juga dapat diartikan sebagai berubahnya intensitas permusuhan atau ke arah peningkatan hubungan kooperatif.¹⁸

¹⁵ Cornelia Brinkmann, *Steps for Peace Building and Conflict Management*, German Development Service (Deutscher Entwicklungsdienst, DED) 2006

¹⁶ Oliver Rasbotham, Tom Woodhouse dan Hugh Miall; *Contemporary Conflict Resolution: Second Edition*, Polity Press, (UK, 2005) hal. 165

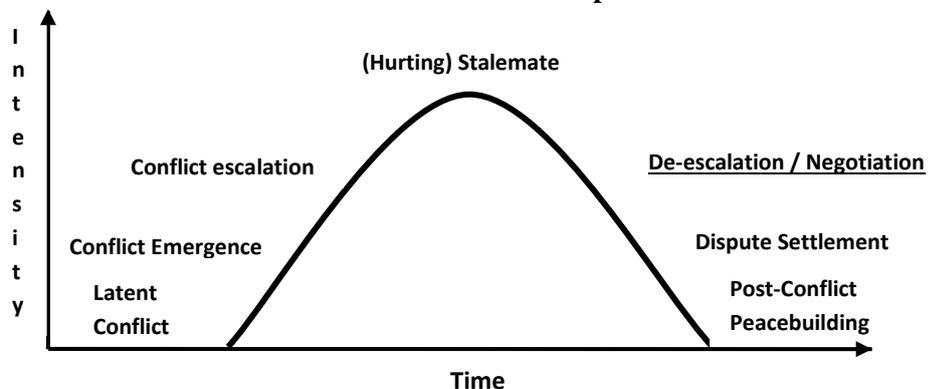
¹⁷ Louis Kriesberg, "Constructive Conflicts: From Escalation to Resolution". Dalam : Michelle Maiese Eds. Guy Burgess and Heidi Burgess, "Limiting Escalation / De-escalation *Beyond Intractability*," Conflict Information Consortium, University of Colorado, Boulder, January 2004. Diakses di <<http://www.beyondintractability.org/essay/limiting-escalation>> pada : 27 Agustus 2014

¹⁸ Louis Kriesberg, "Introduction," *Timing the De-escalation of International Conflicts*, Louis Kriesberg and Stuart J. Thorson, eds. (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1991) dalam Michelle Maiese *Limiting Escalation / De-escalation Beyond Intractability*. Diakses di <<http://www.beyondintractability.org/essay/limiting-escalation>> pada : 28 Agustus 2014

Menurut William Zartman dalam konflik dikatakan ‘matang’ atau siap dalam memasuki sebuah tahap negosiasi dikarakteristikan dengan pencapaian kondisi Hurting Stalemate di kedua belah pihak yang berkonflik.

“Zartman argues that conflicts are ripe for negotiated settlement only under certain conditions. The main condition is a ‘hurting stalemate’. Both sides must realize that they cannot achieve their aims by further violence and it is costly to go on”.¹⁹

Gambar 1.1 Skema Penahapan Konflik



Louis Kriesberg, *De-escalation Stage*
<http://www.beyondintractability.org/essay/de-escalation-stage>

Pada titik ini, kedua belah pihak tidak dapat meningkatkan konflik lebih jauh lagi. Titik intensitas maksimum konflik dan kerusakan telah tercapai.²⁰ Strategi dalam berperang telah gagal, sumber daya yang dimiliki telah habis, dan kedua belah pihak telah mengeluarkan biaya yang besar dalam berkonflik. Hal ini yang membuat pihak yang berkonflik mempertimbangkan kembali *goal* dan

¹⁹ Oliver Rasbotham, Tom Woodhouse dan Hugh Miall; *Contemporary Conflict Resolution: Second Edition*, 2005 Polity Press, UK . p. 166

²⁰ Louis Kriesberg, *Constructive Conflicts: From Escalation to Resolution*. Dalam : Michelle Maiese Eds. Guy Burgess and Heidi Burgess, *Limiting Escalation / De-escalation Beyond Intractability*

pandangan terhadap pencapaian kepentingan dengan memilih cara-cara yang meminimalisir biaya yang harus dikorbankan.

‘A Costly dead-end stalemate, often called mutually hurting, produces the feeling that if we do not negotiate now, it will get worse. In a nutshell, a painful deadlock is more easily noticed when both parties find themselves entrapped in their attempts to advance their objective in vain’²¹

Dalam kasus antara pemerintah Kolombia dan FARC fase *Hurting Stalemate* sebelum adanya De-eskalasi konflik terjadi pada saat pemerintahan Presiden Alvaro Uribe hingga awal pemerintahan Presiden Juan Manuel Santos. Pada pemerintahan Uribe, yang memilih untuk tidak melanjutkan jalan damai sebaliknya menggunakan tekanan militer dalam melumpuhkan FARC yang mana dengan ini melemahkan FARC dari jumlah kombatan juga dari segi finansial yang sebagian besar didapatkan dari bisnis narkoba. Jumlah kombatan pada tahun 1986-1996 dicatat meningkat dari 3600 kombatan menyentuh angka 16500 kombatan.²² Pada tahun 2000 jumlah kombatan meningkat menjadi 17000-18000²³ dan kini mengalami penurunan diperkirakan hingga 9000-8000 kombatan.²⁴

Proses awal negosiasi ditandai oleh berubahnya hubungan dan kondisi diantara kedua pihak atau disebut dengan *turning point* yang memicu untuk mempertimbangkan kembali alternatif dan menjadikan negosiasi sebagai strategi

²¹ Willian Zartman, *Ripeness: The Hurting Stalemate and Beyond*, 2000, dikutip dalam *Understanding Conflict and Conflict Analysis*, Ho-Won Jeong, SAGE Publication 2009 hal. 184

²² Bouvier dan Virginia Marie, *Colombia: Building Peace in a Time of War* (Washington, D.C.: United States Institute of Peace, 2009), dalam G. Lopez, “The Colombian Civil War: Potential for Justice in a Culture of Violence” *Policy Briefing*, vol. 2 no. 1, 2011.

²³ *FARC Multimedia Presentation*, International Crisis Group oleh Crisis Group Communication Unit in Brussels and Latin America <http://www.crisisgroup.be/flash/farc_mar09/farc.html> diakses pada : 19 September 2014

²⁴ “El Gobierno Calcula que las FARC Tienen 9,000 Integrantes,” *Semana*, September 7, 2012, dalam June S Beittel, “Peace Talks in Columbia” *Congressional Research Service Report*, 2014.

yang sangat menentukan dalam menyudahi konflik. *Turning point* hubungan antara FARC dan pemerintah Kolumbia berubah dapat dilihat semenjak bergantinya pemerintahan presiden Alvaro Uribe kepada pemerintahan Presiden Juan Manuel Santos yang menjadi salah satu pertanda dalam proses De-eskalasi.

‘The Beginning process of prenegotiation is generally marked by a turning point in the relationship between the parties, an event or change in conditions that triggers a reassessment of alternatives and adds negotiation to the strategies of conflict management that are seriously considered’²⁵.

Dalam menjelaskan rasionalisasi *turning point* yang terjadi antara FARC dan pemerintah Kolumbia pada kepemimpinan Presiden Santos dan mengapa pada akhirnya kedua pihak memutuskan untuk menurunkan tuntutan dari sebelumnya sehingga dapat mengambil jalan negosiasi, Bonnie A.E Weir menjelaskan melalui tulisan dalam jurnal ilmiahnya “*The Political Transformation of Violent Opposition Movements*”. Menurut Weir, berdasarkan cara pandang dan konstruksi pemikiran dalam sebuah kelompok kekerasan atau oposisi terdapat dua tipe individu yaitu ekstrimis dan moderat.

“... three plausible starting assumptions can be made about the difference between moderates and extremists. First, extremists are simply have more numerous and/or radical demands than do moderates. Second, moderates are willing to compromise while extremist are obstinate zealots. Third, extremist are more willing to use violent means to reach their goals while moderates are less so”²⁶

Perbedaan keduanya terletak pada level tuntutan yang diberikan antara pihak yang berkonflik, pandangan terhadap lawan, dan penggunaan sarana dalam mencapai kepentingan. Ketika ekstrimis terus bertahan kepada tuntutan

²⁵ J.G. Stein, “Getting to the Table: The Triggers, Stages, Functions, and Consequences of Prenegotiation”, *International Journal*, vol. 44, no. 2, 1989, hal. 176

²⁶ Bonnie A.E Weir, *The Political Transformation of Opposition Movemen*, University of Chicago, Maret 2007, hal. 11

yang diinginkan, moderat lebih cenderung mampu menurunkan tuntutan dari sebelumnya, bertindak lebih rasional dengan memilih untuk menggunakan cara minim kekerasan seperti negosiasi yang akan mengakomodasi tuntutan-tuntutan antara kedua belah pihak yang berkonflik. Begitu juga dengan kemunculan individu moderat di sisi pemerintah atau yang dikatakan cenderung bersikap akomodatif memiliki peran penting dalam proses De-eskalasi

“...the emergence to prominence of individuals interested in accommodation with the adversary represents important precursors of de-escalating transition. Civilian leaders (as opposed to army chiefs or guerrilla commanders) generally tend to be more pragmatic and thus more prone to opening the channels of communication when they see the conflict as “ripe” for negotiation”²⁷

Kemunculan dan pergeseran aktor di kelompok oposisi dan pemerintah dari ekstrimis ke moderat ini dapat disebabkan oleh pergantian kepemimpinan pada level masing-masing pihak, yang mana masing-masing individu tersebut memiliki perbedaan konstruksi pandangan mengenai konflik termasuk *cost of violence* dan *political goals* dari pemimpin sebelumnya. Perbedaan konstruksi akan konflik ini yang akan mempengaruhi pertimbangan rasional masing-masing pemimpin dalam memilih untuk menyudahi konflik dengan jalan damai atau negosiasi. Perubahan individu pada level pengambil keputusan pada masing-masing kelompok juga akan mempengaruhi bagaimana cara pandang masing kelompok terhadap biaya dan kerugian yang akan dicapai jika tidak memilih jalan damai dan mengakhiri konflik untuk mendapatkan kepentingan mereka.

²⁷ Veronique Dudouet, *Transition from Violence to Peace*, Berghof Report November 2006, hal. 32

“The de-escalation, settlement and transformation of armed struggles may be conditioned both by the emergence of alternative leadership or new policy options at the top”²⁸

De-eskalasi konflik yang ditandai dengan gestur-gestur yang lebih kooperatif dimulai ketika *Top Commander* FARC Rodrigo Londoño Echeverri memberikan tawaran terbuka kepada Presiden Santos untuk membuka sebuah dialog politik di antara penghujung tahun 2011 dan awal tahun 2012. FARC mengumumkan mengenai rencana pembebasan tawanan yaitu anggota keamanan terdiri dari polisi dan anggota militer Kolumbia yang telah ditawan oleh tentara FARC pada Februari 2012. Selain itu, dalam pengumuman yang dilayangkannya FARC juga mengatakan bahwa mereka akan memberhentikan segala aksi penculikan dan pemerasan. Pada 19 November 2012 dalam sebuah fase pembicaraan damai yang telah dibuka di Kuba, FARC kembali mengumumkan mengenai 2 bulan gencatan senjata sepihak (*unilateral ceasefire*) yang merupakan sebuah tanda-tanda yang baik dari pihak FARC untuk melanjutkan pembicaraan damai ke fase selanjutnya. Selain itu, upaya rekonsiliasi oleh Presiden Santos dengan mempromosikan adanya “*Peace Framework Law*” sebagai salah satu cara dalam memberikan pendekatan kepada kelompok gerilya. Dengan pemberian amnesti kepada gerilyawan terdahulu dan memungkinkan kesempatan bagi mereka untuk ikut serta dalam perpolitikan setelah seluruh kesepakatan dalam negosiasi tercapai dan disepakati.

²⁸ *ibid*

D. Hipotesa

Berdasarkan landasan konseptual yang digunakan oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, dapat ditarik kesimpulan mengenai latarbelakang terjadinya perundingan damai antara FARC (*Revolutionary Armed Forces of Columbia*) dengan pemerintah Kolumbia pada tahun 2012-2014, yaitu sebagai berikut:

1. Telah tercapainya fase puncak dalam berkonflik atau yang disebut sebagai *Hurting Stalemate* antara kelompok FARC dan pemerintah Kolumbia yang ditandai dengan adanya penurunan taktik berperang, aktor dan tuntutan yang diberikan.
2. Keberadaan aktor-aktor moderat yang muncul di kedua belah pihak mempengaruhi bagaimana pertimbangan rasional yang mereka ambil salah satunya untuk memutuskan untuk melakukan negosiasi, yaitu keberadaan Presiden Juan Manuel Santos di kelompok pemerintah, dan Rodrigo Londoño Echeverri di kubu FARC.

E. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dalam penulisan skripsi ini akan meliputi hubungan dan interaksi FARC (*Revolutionary Armed Forces of Columbia*) dan pemerintah Kolumbia sejak pemerintahan presiden Alvaro Uribe pada tahun 2002 hingga tahun 2012 ketika dimulainya perundingan damai dibawah pemerintahan presiden

Juan Manuel Santos. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk menggunakan data dan fakta sebelum tahun 2002 untuk memperkuat analisa.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian mengenai latar belakang terjadinya perundingan damai antara pemerintah Kolumbia dan FARC ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tahapan : a. Pengumpulan Data b. Analisa Data c. Penulisan Laporan. Dalam teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) dengan cara mengumpulkan dan memilah sumber data sekunder dari buku-buku pustaka, jurnal dan laporan penelitian, e-book, majalah, dan sumber elektronik (internet) yang menunjang dalam memberikan informasi mengenai negara Kolumbia, sejarah dan dinamika konflik antara FARC dengan pemerintah Kolumbia, serta konsep-konsep terkait dengan konflik yang terjadi di Kolumbia.

Metode analisa data yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif kualitatif yang mana data yang didapatkan dalam tahap pengumpulan data akan dikelompokkan sesuai kategori dan dianalisa dengan kerangka konseptual yang digunakan lalu digambarkan secara sistematis sehingga dapat menjawab dan menghasilkan hipotesa berdasarkan rumusan masalah yang ada.

Yang terakhir adalah penulisan laporan yang mana dari keseluruhan data yang telah didapatkan dan dianalisa akan diambil sebuah kesimpulan untuk dituliskan dalam laporan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini akan dipaparkan sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan konseptual, hipotesis, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Pasang Surut Konflik Dan Pemberontakan FARC di Kolumbia

Bab dua akan membahas mengenai latar belakang 50 tahun konflik antara FARC (*Revolutionary Armed Forces of Columbia*) dengan pemerintah Kolumbia. Dalam pembahasan di bab ini pertama-tama penulis akan membahas mengenai sejarah kemunculan kelompok-kelompok gerilya khususnya FARC dan kondisi sosial-politik negara kolumbia yang memicu timbulnya konflik sipil di Kolumbia.

BAB III: Dinamika Perdamaian Dan Pergeseran Upaya Resolusi Konflik Pemerintah Kolumbia Terhadap FARC

Bab tiga akan membahas mengenai pasang surut interaksi antara pemerintah Kolumbia dengan FARC (*Revolutionary Armed Forces of Columbia*) dalam setiap upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh pemerintah Kolumbia dengan FARC. Dalam bab ini, penulis juga akan menunjukkan adanya pergeseran upaya resolusi konflik pemerintah Kolumbia sebelum pada akhirnya memasuki fase De-eskalasi.

BAB IV: Faktor Pendorong Terjadinya Perundingan Damai Antara Pemerintah Kolumbia Dan FARC Pada Tahun 2012

Bab empat akan membahas mengenai faktor-faktor serta kondisi yang mendorong pemerintah Kolumbia dan FARC kembali pada meja ‘perundingan damai’ pada tahun 2011/2012. Dalam bab ini, pembuktian melalui data-data yang ada dalam bab sebelumnya diulas kembali untuk mempertegas agumentasi penulis.

BAB V: Bab lima berisi kesimpulan-kesimpulan serta point-point penting terkait dengan faktor pendorong terjadinya perundingan damai antara pemerintah Kolumbia dan FARC tahun 2012.